

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBUDIDAYAKAN HAK ASASI MANUSIA

Ahmad Arif Fadilah¹ Siska Yuni Ariani² Meli Agustin³

arif.fadilah@umt.ac.id siskayuniariani@gmail.com meliagustin43711@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstract

This research aims to analyze how children's human rights are implemented, particularly in the context of access to education in Indonesia. Through case studies in several schools, this research uses qualitative observation methods and in-depth interviews with teachers and parents. The results show that there are disparities in access to education for children from different social and economic backgrounds. Factors such as tuition fees, school distance and discrimination are still obstacles in realizing children's right to proper education. The study concludes that there is a need for more comprehensive efforts from the government, communities and schools to ensure all children can enjoy their right to quality education.

Keywords: implementation of human rights education

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hak asasi manusia anak yang diimplementasikan, khususnya pada konteks akses terhadap pendidikan di Indonesia. Melalui studi kasus di beberapa sekolah, penelitian ini menggunakan metode observasi kualitatif dan wawancara mendalam dengan guru dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas akses pendidikan pada anak-anak dari latar belakang sosial maupun ekonomi berbeda. Faktor-faktor seperti biaya pendidikan, jarak sekolah, dan diskriminasi masih menjadi kendala dalam mewujudkan hak anak atas pendidikan yang layak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah untuk memastikan semua anak dapat menikmati hak mereka atas pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci: implementasi pendidikan ham

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/sindoro.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah aset berharga supaya membangun juga karakter kehidupan bangsa yang mengalami perkembangan. Adanya peran pendidikan sangat penting disebabkan adanya kaitan yang kuat pada manusia yang bermartabat, sehingga hak atas pendidikan berupa hak asasi manusia (HAM). Pendidikan mencakup hak, pendidikan termasuk sarana utama atau *indispensable means* agar tercapainya HAM.

Instrumen HAM internasional dilalui oleh ketentuan Pasal 13 ayat (1) ICESCR dinyatakan jika hak atas pendidikan berupa hak dasar untuk tiap-tiap orang yang ditujukan agar kemampuan manusia seluruhnya berkembang. Dengan begitu, hak atas pendidikan sudah dipastikan untuk hak konstitusional, yang dicantumkan pada Pasal 31 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, didukung dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM.

Pada kaitannya tersebut, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ditegaskan jika pendidikan dilaksanakan dengan demokratis, adil, diskriminatif tidak ada tetapi tinggi HAM dijunjung nilai keagamaan dan kultural, serta bangsa majemuk. Pada prinsipnya, nilai dan standar HAM sebenarnya telah termasuk bagian penting ketika pelaksanaan proses pendidikan nasional di Indonesia. Maka dari itu, artinya HAM dijadikan salah satu dasar penting agar sistem pendidikan nasional dapat tegak.

Berkaitan pada pendidikan tinggi yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2012 terkait Pendidikan Tinggi (selanjutnya UU Dikti) ditegaskan jika pelaksanaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif tetapi HAM dijunjung tinggi, nilai agama dan nilai budaya, majemuk, persatuan, bahkan kesatuan yang dimiliki bangsa.

Memahami HAM juga kesadarannya membutuhkan tumbuh kembang, sehingga upaya untuk pendidikan HAM (human rights education) langsung untuk tahu, berikutnya penerapan implementasi ketika proses bagi pembelajaran. Hal tersebut dilakukan setiap satuan pendidikan yang didasarkan, jadi ruang pendidikan HAM diberikan kepada banyak mahasiswa yang berkepentingan sama saja agar prinsip juga nilai-nilai HAM berupaya sehingga fungsi, tujuan pendidikan nasional, serta pendidikan tinggi sendiri semakin kuat.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Artikel ini mengambil data diperoleh dari berbagai literatur yang berupa data fisik seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan lainnya kaitannya pada peran pendidikan kewarganegaraan dalam membudayakan hak asasi manusia. Selanjutnya, teori-teori yang relevan dianalisis dan dikaji. Temuan data disajikan oleh penulis secara objektif, juga sistematis, tekniknya memakai teknik analisis deskriptif data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan hak asasi manusia

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua konsep yang berkaitan dengan erat. PKn berperan sebagai fondasi bagi pemahaman dan penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan HAM menjadi tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Bagaimana Keduanya Saling Terhubung? Melalui PKn, individu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep HAM, sejarahnya, dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. PKn mengajarkan bahwa HAM merupakan hak setiap individu yang melekat tidak memandang ras, agama, gender, bahkan status sosial lainnya. PKn menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan yang menjadi dasar dalam menghargai hak-hak orang lain dengan ini menjadikan dorongan bagi individu untuk bersikap toleran, empati, dan menghormati perbedaan pendapat dan

keyakinan. PKn melatih individu untuk berpikir kritis dan menganalisis situasi terkait pelanggaran HAM. Pendidikan ini mendorong individu untuk terlibat aktif pada upaya melindungi HAM, baik partisipasi organisasi masyarakat sipil maupun melalui mekanisme negara.

2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam membudidayakan HAM

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membudidayakan HAM memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini. Adanya peningkatan kesadaran membekali individu dengan pemahaman mendalam terkait hak dan kewajiban oleh warga negara, serta pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Pembentukan karakter menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan rasa keadilan dalam diri setiap individu, sehingga mampu menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Mendorong Partisipasi Aktif warga negara agar berkontribusi aktif pada saat kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, serta berperan dalam menjaga dan menegakkan HAM. Mencegah Pelanggaran HAM, caranya memberi pengetahuan juga keterampilan yang dibutuhkan agar pelanggaran HAM yang terjadi dicegah, baik sebagai pelaku maupun korban. Memperkuat Demokrasi terciptanya masyarakat yang demokratis, jadi setiap individu punya kesempatan sama dalam berpartisipasi, serta suara mereka didengar. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan agar terbentuknya warga negara yang baik, sehingga tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga bertanggung jawab untuk menghormati pada hak-hak dan ikut serta untuk membangun masyarakat adil dan beradab.

3. Strategi peningkatan peran pendidikan kewarganegaraan

Studi literatur mengungkapkan berbagai strategi yang berhasil dalam pengajaran PKn. Strategi-strategi ini dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan.

- Pendekatan Partisipatif: Pendekatan partisipatif dalam pengajaran PKn melibatkan siswa yang aktif ketika proses pembelajaran. Diskusi kelompok, simulasi, dan berbagai proyek komunitas adalah contoh metode yang bisa dipakai agar partisipasi pada siswa meningkat. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu siswa agar keterampilan berkembang, berpikir kritis serta kolaborasi.
- Integrasi Teknologi: Integrasi teknologi dalam pengajaran PKn dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Penggunaan multimedia, e-learning, dan alat-alat interaktif lainnya dapat membantu menyampaikan materi caranya lebih menarik juga interaktif. Teknologi juga memungkinkan akses ke sumber-sumber belajar yang lebih luas dan beragam.
- Kolaborasi antara Sekolah dan Komunitas: Kolaborasi antara sekolah dan komunitas dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memperkuat keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan kehidupan nyata. Program-program seperti kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dapat memberikan konteks praktis bagi pembelajaran PKn.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga mampu membangun identitas nasional sehingga menjadi kuat juga mempersiapkan siswa agar warga menjadi aktif, kritis, serta bertanggung jawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi PKn, terdapat berbagai cara inovatif untuk mengatasinya dan memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional di Indonesia (Octavian, 2023)

4. Contoh penerapan pendidikan kewarganegaraan dalam membudidayakan HAM

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada sekolah dasar adalah mata pelajaran, tujuannya agar terbentuknya warga negara yang baik, lalu cerdas, terampil, juga memiliki karakter berdasarkan nilai terkandung pada Pancasila juga UUD 1945 (Kemendikbud, 2013). PKn belajar terkait berbagai konsep kewarganegaraan, lalu demokrasi, warga negara yang memiliki hak juga kewajiban, serta nilai-nilai terkandung dalam bangsa. Selain itu, pendidikan HAM adalah usaha terstruktur sehingga tertanam memahami, menghargai, juga menghormati pada hak asasi manusia secara keseluruhan, tidak bisa disingkirkan. (Bajaj, 2011).

Pendidikan hak asasi manusia (HAM) menempati peran penting agar terbentuknya karakter dasar pada peserta didik, sehingga paham, menghargai nilai kemanusiaan, serta masing-masing individu memiliki hak yang fundamental. Berdasarkan Tibbitts (2019), tujuan dari pendidikan HAM menyampaikan pengetahuan terkait HAM, juga sikap yang dikembangkan, keterampilan, serta tingkah laku berdasarkan berbagai prinsip HAM. Maka dari itu, pendidikan HAM ikut campur agar tercipta masyarakat dengan lebih adil, inklusif, juga memiliki martabat. Pendidikan HAM sangat penting dipadukan saat usia masih dini, ditegaskan pada Gerber (2020), dinyatakan jika berbagai anak mempunyai kemampuan paham berbagai konsep HAM juga dikembangkan, serta beberapa isu kemanusiaan dipedulikan. Dengan ditanamkan paham tersebut, setiap individu generasi muda bisa berkembang untuk menilai artabat manusia, damai yang dipromosikan, berbagai macam diskriminasi dilawan, bahkan tidak adil.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terkait HAM mempunyai sebagian tujuan awal, berupa: meningkatnya pemahaman konsep juga prinsip-prinsip HAM, sikap dikembangkan dan tingkah laku hormat terhadap HAM, memberi keterampilan agar mengusahakan perlindungan juga penegakan HAM, toleransi dikenalkan, tidak diskriminasi dan setara, budaya damai yang dibangun dan penyelesaian konflik dengan damai.

Menyatukan Pendidikan HAM pada Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Pendidikan. Kewarganegaraan (PKn) pada sekolah dasar dijadikan acuan sesuai agar menyatukan pendidikan HAM pada kurikulum pendidikan. Hal tersebut dinyatakan oleh Gollob dan Krapf (2018), PKn berperan krusial sehingga warga negara aktif terbentuk, tanggung jawab, juga nilai terkandung dalam demokrasi dan HAM yang dihargai. PKn mencakup konsep dalam kewarganegaraan, lalu demokrasi, warga negara memiliki hak juga kewajiban, kaitannya kuat pada HAM yang dihormati. Negara Indonesia, terdapat kurikulum merdeka diterapkan pada pembelajaran PKn sekolah dasar sudah menyatukan pendidikan HAM ke dalam kompetensi yaitu inti dan dasar, bahkan materi yang diajarkan. Meskipun demikian, implementasi di tempat yang dituju bermacam tantangan juga hambatan masih saja dihadapi, hal tersebut dinyatakan oleh Wahyudin (2021). Tantangan berupa terbatasnya pengetahuan juga guru yang kurang berkompetensi, kurangnya sumber daya juga bahan ajar mendetail, serta kurang efektif pada metode saat mengajar.

Strategi yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan HAM pada PKn dan metode pada pembelajaran PKn ketika sekolah dasar diimplementasikan dengan efisien yaitu didasarkan terhadap peserta didik yang memiliki karakteristik. Menurut Mihr dan Schmitz (2020), pendidikan HAM pasti diberikan pelajaran melalui pendekatan partisipatif, transformatif, juga kontekstual sehingga peserta didik merasa bermakna lebih, pembelajaran kontekstual: materi tentang HAM dikaitkan pada keadaan nyata juga berdasarkan pengalaman selama hidup, agar bermakna lebih bahkan mudah dipahami, diskusi, serta

debat disediakan isu-isu HAM sehingga peserta didik paham, mampu berpikir kritis mengalami peningkatan, simulasi serta bermain peran: disini peserta didik terbantu untuk paham konsep-konsep HAM lebih jelas juga empati yang berkembang, pembelajaran berbasis proyek: proyek dilakukan nyata berkaitan pada penegakan HAM, misalnya kampanye anti bullying ataupun kegiatan sosial bermasyarakat, studi kasus berupa beragam pelanggaran HAM dianalisis, juga mendistribusikan jalan keluar berdasarkan prinsip yang dimiliki HAM. Itu semua dilakukan peserta didik.

Kesimpulan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang esensial, juga mendasar untuk menciptakan masyarakat adil dan beradab. Baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional, hak atas pendidikan ditegaskan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan HAM menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam kurikulum pendidikan, diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang memahami mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, juga keberagaman. Pendidikan HAM adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan memberikan pendidikan HAM yang berkualitas, kita dapat menciptakan generasi muda yang menjunjung tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, juga keberagaman. Hal tersebut juga terlibat pada terciptanya masyarakat lebih damai serta harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Iswanda, M. L. ., & Dewi, D. A. . (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (1), 1494-1500.
- Atmojoyo. M, Wibowo, D. C & Juliansyah. E. (2016). HUBUNGAN PEMAHAMAN MATERI HAK ASASI MANUSIA DENGAN PERILAKU SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal PPKn*, Vol. 4 No. 1.
- Putri, S. B., & Dewi, D. A (2021). Reaktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 3 (2) 2021 hal 42-49.
- Dwiyatmi, S. H .,Dkk. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Hamid. A & Saebani, (2012). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*.
- Keet, A. (2020). Human rights education and the critical study of human rights. *Human Rights Education Review*, 3 (2), 1-26. <https://doi.org/10.7577/brer.3942>
- Ali, A. (2023). Investigating The Clash of Discourses on Linguistic Human Rights: Focus on the Private Schools in Sindh, Pakistan. *Forma y Funcion*, 36 (2). <https://doi.org/10.15446/tyf.v36n2.101898>
- Ayalew, Y. D. (2023). The promise of digital Out-of-School programs for supporting youth in Under-resourced communities: Participatory principles for human rights-based virtual youth groups *Social Work with Groups*. <https://doi.org/10.1080/11609513.2023.2285755>